Jurnal Ilmu Sosial **Mamangan**

**Kontestasi Ruang:
Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis**
Prof. Dr. Afrizal, MA.

**Politik Ekologi :
Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran**
Dr. Zainal Arifin, M. Si.

**Fiqh Lingkungan;
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lingkungan**
Abrar, M. Ag.

**Bertani di Dua Kota Asia;
Menarik Pelajaran Dari Jakarta Dan Manila**
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si.

**Puar Cama, Hutan Untuk Anak Cucu;
Konsep Sustainability Forest Lokal di Mbeliling, Manggarai Barat**
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Perjuangan Hak Ekologis
Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.

Jurnal Ilmu Sosial **Mamangnan**

Nomor I, Volume 1
Tahun 2012

ISSN :
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Mitra Bestari

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

Dewan Redaksi

Dr. Zusmelia, M. Si.
Dr. Maihasni, M. Si.
Adiyalmon, S. Ag., M. Pd.
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Pemimpin Redaksi

Firdaus, S. Sos., M. Si.

Anggota Redaksi

Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.
Rinel Fitlayeni, S. Sos., MA.
Surya Prahara, SH.

ISSN: 2301-8496

viii + 65 halaman, 21 x 29 cm

Alamat Redaksi:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang
Jl. Gunung Pangilun, Padang
Email: redaksimamangan@yahoo.com

Penerbit :

Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang

Contac person :

Firdaus (Hp. 085263881221. Email : daus_gila@yahoo.com)

Pengantar Redaksi

Beberapa dekade belakangan, isu lingkungan terus berkembang dan menjadi topik utama di berbagai diskusi ilmiah dan mimbar publik. Diskursus tentang lingkungan kemudian semakin meluas pada berbagai dimensi hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Sebuah teori klasik yang ditulis oleh Steward mencatat bahwa pada berbagai suku bangsa berburu – meramu (*hunting – gatering*), variasi komposisi jumlah anggota suatu kelompok, sangat ditentukan oleh sumber alam yang ada di sekitarnya dan siklusnya; ada yang besar jumlah anggotanya dan ada pula yang kecil (Poerwanto, 2005:63). Atas dasar ini kemudian isu lingkungan terus berkembang luas mencakup berbagai dimensi.

Mengikuti berbagai perkembangan isu lingkungan dengan dimensi yang sangat luas itu, kami memiliki kesadaran bahwa masalah lingkungan tidak bisa dilihat dan dimaknai secara parsial dalam dimensi yang berorientasi fisik, akan tetapi jauh lebih penting melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial yang luas. Dimensi sosial itu mencakup berbagai aspek, baik yang berhubungan langsung dengan lingkungan fisik maupun tidak. Atas dasar itulah, Jurnal MAMANGAN edisi perdana yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar yang kini ada di tangan pembaca memilih untuk fokus pada isu lingkungan dengan mencoba melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial dari berbagai perspektif.

Secara keseluruhan, tulisan pada edisi perdana ini membahas isu lingkungan dari berbagai pendekatan dan praktek di Indonesia dan Asia. Tulisan pada edisi ini terdiri dari 6 (enam) buah tulisan yang bersumber dari penelitian lapangan dan artikel teoritik yang disumbangkan oleh para akademisi dan peneliti yang sudah berkecimpung lama dalam bidangnya.

Tulisan pertama ditulis oleh Afrizal, yang berbicara tentang kontestasi ruang oleh berbagai pihak pada masyarakat modern yang didominasi oleh keperluan untuk uang dan konservasi. Afrizal menekankan tulisannya pada aspek kontestasi ruang dan keadilan ekologis dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan perspektif keadilan ekologis. Argumen pokok artikelnya disandarkan pada asumsi bahwa ruang merupakan habitat suatu masyarakat hukum adat Indonesia. Dengan asumsi tersebut, Afrizal berargumen bahwa penggunaan ruang dalam habitat masyarakat hukum

adat dengan cara mengibiri eksistensi mereka adalah suatu ketidakadilan ekologis. Oleh sebab itu resistensi serta perlawanan warga masyarakat hukum adat adalah resistensi dan perlawanan terhadap ketidakadilan ekologis.

Tulisan kedua ditulis oleh Zainal Arifin tentang politik ekologis. Tulisan Arifin mendiskusikan tentang perkembangan wacana ramah lingkungan sebagai salah satu cara dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan, serta dampaknya bagi keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut Arifin tidak semua aktivitas, program dan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah, NGO maupun melalui perorangan mampu membawa dampak yang berarti dalam mengatasi persoalan lingkungan. Banyak kasus justru menunjukkan bahwa aktivitas, program, dan kebijakan tersebut hanyalah wacana yang dikembangkan demi kepentingan tertentu.

Tulisan ketiga ditulis oleh Abrar yang mengusung isu rekonstruksi pemahaman yang berwawasan antroposentris terhadap alam dengan pemahaman yang teosentris dengan meletakkan segala sesuatu sebagai bagian integral dari moralitas agama, sehingga alam dan ekosistemnya berproses secara seimbang dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Perspektif ini menurutnya juga mengacu pada kepentingan manusia yang dalam Islam disebut *al-Maslahah (human welfare)*, akan tetapi kepentingan yang didasarkan pada moralitas agama bukan antroposentris.

Tulisan keempat ditulis oleh Semiarto A. Poerwanto yang mengulas tentang aktifitas pertanian di dua kota, kota Manila dan kota Jakarta. Di Jakarta, pertanian kota lebih merupakan bagian dari adaptasi kaum migran, baik yang baru datang dari desa maupun yang telah dua-tiga generasi berpindah. Di Manila pertanian kota merupakan bagian dari inisiatif politik yang terkait dengan strategi untuk mengambil hati masyarakat miskin kota. Pemerintah pusat dan daerah mengajukan program pertanian sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan gizi keluarga.

Tulisan kelima ditulis oleh Firdaus tentang kearifan lokal masyarakat Manggarai Barat dalam menjaga dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Menurut Firdaus, masyarakat Manggarai Barat memiliki *Puar Cama* sebagai milik bersama dengan sistem *tuak*. *Puar Cama* dengan sistem *tuak* ini menurutnya merupakan kekuatan lokal dalam menjaga kalastarian lingkungan. Namun, di sisi lain masyarakat adat harus dihadapkan dengan hukum positif negara.

Tulisan keenam ditulis oleh Dian K. Anggreta tentang konflik lingkungan antar komunitas petani Kelurahan Kampung Jua Nan XX dengan PT. Semen Padang. Dalam tulisannya, Anggreta menguraikan pertentangan antara kedua kelompok dalam bentuk protes, negosiasi dan perundingan. Sumber konflik menurutnya berasal dari kerugian petani yang disebabkan oleh limbah PT. Semen Padang yang sudah dialami masyarakat sejak tahun 1985.

Akhirnya, kepada para penyumbang tulisan, redaksi mengucapkan terima kasih atas sumbangan tulisan, dan kepada pembaca kami ucapkan selamat membaca.

Salam
Redaksi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	v
 Kontestasi Ruang: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis Afrizal	 1
 Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran Zainal Arifin	 11
 Islam Dan Lingkungan Abrar	 17
 Bertani di Dua Kota Asia; Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila Semiarto A. Purwanto	 25
 <i>Puar Cama</i> Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat Firdaus	 39
 Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani Dian Kurnia Anggreta	 51
 Biografi Penulis	 61

KONTESTASI RUANG: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis¹

Afrizal

(Guru Besar Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang)

Abstrak

Baik dalam masyarakat pramodern maupun modern ruang diperebutkan oleh berbagai pihak, tetapi dalam masyarakat modern perebutan ruang didominasi oleh keperluan untuk uang dan konservasi. Dari sinilah konsep keadilan ekologis menjadi relevan untuk diterapkan dalam memaknai perebutan ruang untuk berbagai keperluan di suatu wilayah dalam masyarakat modern. Artikel ini akan membahas kontestasi ruang dan keadilan ekologis dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan perspektif keadilan ekologis. Argumen pokok artikel ini adalah ruang merupakan habitat suatu masyarakat hukum adat Indonesia, baik yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan. Bagi mereka, ruang tidak hanya penting untuk tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, melainkan juga untuk melaksanakan kebutuhan sosial dan budaya. Penggunaan ruang dalam habitat masyarakat hukum adat dengan cara mengibiri eksistensi mereka adalah suatu ketidakadilan ekologis dan oleh sebab itu resistensi serta perlawanan warga masyarakat hukum adat adalah resistensi dan perlawanan terhadap ketidakadilan ekologis.

Kata Kunci: Resistensi, kontestasi, tanah ulayat, habitat, Masyarakat Hukum Adat, keadilan ekologis

Pendahuluan

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi resistensi dan perlawanan warga masyarakat hukum adat terhadap bisnis dan pemerintah secara meluas di Indonesia. Hal ini telah mengakibatkan kerugian, baik pada warga masyarakat hukum adat karena mereka

diintimidasi dan ditangkapi oleh pihak keamanan maupun perusahaan akibat aset mereka seperti kebunnya dibakar atau dipanen dan akses mereka ke lahan dihalangi oleh penduduk tempatan (Bachriadi 2001; Nuh dan Collins 2001; Afrizal 2007a, 2007b, dan 2011a).

Resistensi dan perlawanan warga masyarakat hukum adat tersebut berkenaan dengan penggunaan tanah yang berada dalam wilayah adat mereka yang dalam pandangannya, mereka memiliki hak ulayat atas tanah tersebut

¹ Artikel ini merupakan revisi dari makalah yang pernah dipresentasikan dalam Workshop Penyempurnaan Tata Ruang Berbasis Ekosistem, Universitas Andalas dan WWF For Trust, Padang 10-11 Desember 2010.

(Colchestester, dkk., 2006, Colchestester dan Jiwan 2006; Afrizal 2007a 2007b, 2010, 2011a). Dengan mekanisme yang telah dilakukan oleh pemerintah dan atau para investor untuk mengambil alih tanah ulayat, penduduk tempatan memaknai pengambilalihan tanah ulayat mereka sebagai tindakan perampasan hak-hak mereka oleh perusahaan-perusahaan dan negara (Nuh dan Collins 2001; Colchestester, dkk., 2006, hal. 72-172; Afrizal 2007a, 2007b, 2010, dan 2011a).

Artikel ini akan menyajikan dasar-dasar motivasional resistensi dan perlawanan warga masyarakat hukum adat dalam mempertahankan dan merebut tanah. Dari sudut teori gerakan sosial ini disebut sebagai *framing* (kerangka) aksi-aksi kolektif. Argumen pokok artikel ini adalah ruang merupakan habitat suatu masyarakat hukum adat Indonesia. Ruang tidak hanya penting untuk tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, melainkan juga untuk melaksanakan kebutuhan sosial dan budaya. Ini adalah kerangka motivasional perjuangan warga masyarakat hukum adat.

Studi Pustaka

Antara kehidupan sosial dan alam terjalin hubungan yang kompleks. Alam berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Umpamanya, anggota masyarakat yang hidup di pesisir mengembangkan tradisi yang berbeda dengan anggota masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Dalam literatur sosiologi lingkungan, pandangan seperti ini refleksi dari pandangan *New Ecological Paradigme*, NEP (Paradigma Ekologis Baru) (Williams, 2007). Akan tetapi, alam itu sendiri juga terpengaruh oleh kehidupan sosial dan menjadi bagian darinya. Berbagai pihak dalam kehidupan sosial memerlukan spasial untuk melakukan berbagai kegiatan yang dari perspektif mereka merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Ini menimbulkan kontestasi ruang (Lih. Afrizal 2007 dan 2011b).

Baik dalam masyarakat pramodern maupun modern, ruang diperebutkan oleh berbagai pihak, tetapi perebutan ruang jauh lebih intensif dan kompleks dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat pramodern terjadi perebutan ruang dengan menggunakan kekerasan (perperangan) dengan tujuan perluasan kekuasaan dan eksploitasi sumberdaya alam. Ibnu Khaldun, umpamanya, menyajikan bahwa komunitas-komunitas di Afrika saling mendominasi untuk memperebutkan ruang (Lauer 1989: 46-9). Perebutan ruang dalam masyarakat modern didominasi oleh keperluan untuk uang dan konservasi dan melibatkan aktor-aktor negara, bisnis, dan masyarakat sipil (baca Afrizal 2007a, 2007b, 2011b dan Colchester 2009²).

Dari sinilah konsep keadilan ekologis menjadi relevan untuk diterapkan dalam menganalisis perebutan ruang untuk berbagai keperluan di suatu wilayah dalam masyarakat modern. Keadilan ekologis dimaknai sebagai penggunaan ruang untuk berbagai keperluan berdasarkan pertimbangan hak dan kepentingan para pihak terhadap suatu ruang. Indikatornya adalah kepedulian terhadap hak-hak pemangku kepentingan (DFID 2000: 11) dan kejujuran serta kewajaran. Penggunaan ruang oleh suatu pihak dengan cara yang mengibiri hak dan kepentingan pihak lain atau tidak wajar dan tidak jujur adalah ketidakadilan ekologis.

Terjadi kontestasi terhadap ruang dalam masyarakat Indonesia modern, baik yang hidup di perdesaan maupun di perkotaan. Kontestasi yang paling berpengaruh adalah perebutan tanah antara warga masyarakat hukum adat dengan pebisnis. Sudah banyak tulisan tentang perilaku berbagai pihak yang terlibat untuk mempertahankan atau merebut tanah dan akar-akar struktural kontestasi tersebut, tetapi masih sedikit tulisan yang membahas dasar-dasar motivasional resistensi dan perlawanan

² Colchester membahas secara komprehensif perebutan ruang oleh pemerintah dari kontrol masyarakat hukum adat untuk tujuan konservasi di dunia.

warga masyarakat hukum adat. Konsep keadilan ekologis dapat diterapkan untuk menelaah dasar motivasional warga masyarakat hukum adat tersebut. Argumen pokok artikel ini adalah ruang merupakan habitat suatu masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di perdesaan maupun di perkotaan, ruang tidak hanya penting untuk tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, melainkan juga untuk melaksanakan kebutuhan sosial dan budaya. Penggunaan ruang dalam habitat masyarakat hukum adat dengan cara mengibiri eksistensi mereka akan mereka tentang dan lawan.

Ruang Sebagai Habitat Masyarakat Hukum Adat

Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup yang sesuai dengan kebutuhannya (Irwan 210: 58). Konsep ini dipakai oleh ahli ekologi dan biologi untuk menjelaskan relasi antara binatang dan tetumbuhan dengan ruang. Kemudian seorang ahli ilmu sosial, Pierre Bourdieu menggunakan konsep habitat untuk analisis gejala sosial. Dalam analisis fenomena sosial gaya hidup, Bourdieu menggunakan konsep habitat untuk menyebut sesuatu yang ada dalam diri sebagai hasil internalisasi yang bertindak sebagai kerangka tindakan individu (Lury 1996: 111-113). Dalam artikel ini saya menggunakan konsep habitat untuk menyebut suatu ruang geografis yang di dalamnya orang melakukan sesuatu dan kepadanya diri dilengketkan.

Pertama, ruang adalah sebagai habitat identitas sosial warga masyarakat hukum adat. Identitas sosial adalah ekspresi diri sebagai anggota suatu kelompok. Ini adalah konsepsi diri sebagai bagian dari suatu kolektivitas. Dalam kehidupan sosial modern, konsepsi diri sebagai anggota suatu kelompok sosial sangat penting karena hal tersebut menjadi modal sosial dalam kehidupan. Ekspresi diri tersebut menggunakan penanda-penanda yang bermakna pernyataan diri sebagai anggota suatu kelompok sosial.

Bagi berbagai masyarakat di Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, salah satu penanda tersebut yang penting adalah ruang. Orang mengkonsepsikan dirinya, umpamanya, sebagai Orang Batak, Orang Aceh, Orang Dayak, Orang Mimika, Orang Mentawai, dan Orang Minangkabau salah satunya adalah dengan mengacu kepada suatu wilayah. Orang Batak dan Orang Dayak, dan seterusnya, adalah kami yang tinggal dan hidup dalam suatu ruang tertentu. Umpamanya, bagi orang Minangkabau tanah ulayat dijadikan sebagai penanda sebagai warga nagari, yang disebut anak nagari.

Kemudian penanda identitas berbasis ruang tersebut dapat mengacu kepada ruang yang spesifik. Umpamanya, bagi anggota masyarakat suatu nagari di Sumatera Barat, disamping nagari merupakan penanda identitas sosial, areal pemakaman (pandan pekuburan) dan tanah milik bersama (tanah ulayat) merupakan penanda-penanda identitas sosial. Sebagai orang suatu nagari, orang harus memiliki pandan perkuburan dan tanah ulayat. Malah para ahli Minangkabau menyatakan bahwa matrilineal sebagai ciri khas Masyarakat Minangkabau hilang apabila tanah ulayat tidak ada lagi.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa identitas sosial berbagai suku bangsa di Indonesia lengket kepada suatu wilayah. Inilah yang disebut dengan *ethoterritorialism*, wilayah etnis. Hal ini berbeda dengan masyarakat Amerika. Dalam masyarakat Amerika, konsepsi diri sebagai anggota suatu suku bangsa tidak lengket dengan wilayah. Menjadi orang Negro atau Yunani tidak berarti memiliki suatu ruang. Akibatnya, mereka tidak memiliki konsep kampung. Di Indonesia, susah dibayangkan suatu suku bangsa tidak lengket dengan suatu wilayah. Wilayah tidak hanya menjadi penanda asal usul, melainkan penanda keberadaan itu sendiri. Dengan demikian, wilayah adalah habitat suatu suku bangsa.

Sebagai contoh di Provinsi Sumatera Barat. Nagari sebagai suatu wilayah tidak hanya suatu

spasial untuk melakukan berbagai aktivitas, tetapi juga menjadi identitas sosial warga masyarakat nagari. Mereka membedakan diri mereka dengan orang lain dengan nagari mereka. Saya orang Padang Luar, mereka orang Simawang. Nagari Padang Luar dan Simawang digunakan untuk mendefinisikan diri. Hal ini menimbulkan nagari sebagai suatu teritori penting secara simbolis bagi warga nagari. Nagari tidak hanya penting sebagai tempat tinggal dan tempat bertani, nagari juga penting sebagai penanda diri warga nagari. Nagari dalam hal ini tidak hanya penanda asal usul, melainkan juga penanda keberadaan sebagai orang Padang Luar atau Simawang. Dengan demikian, nagari sebagai sebuah wilayah merupakan habitat orang-orang Minangkabau.

Kedua, ruang merupakan habitat bermain. Anggota suatu masyarakat biasanya mempunyai permainan rakyat yang memerlukan ruang terbuka untuk melakukannya. Ada saja permainan yang diminati oleh banyak orang dan dianggap suatu kebutuhan untuk melakukannya. Permainan tersebut berguna sebagai pengisi waktu senggang. Untuk melakukannya, tersedianya ruang terbuka diperlukan.

Sebagai contoh, di Sumatera Barat dikenal permainan buru babi dan layang-layang. Kedua permainan ini diminati oleh banyak orang, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Kedua permainan ini mempunyai penekun yang setia dan cenderung diwarisi kepada generasi berikut. Pemerintah kabupaten dan kota terus pula mendorong berkembangnya kedua permainan ini. Buru babi dan permainan layang-layang memerlukan tersedia untuk melakukannya dan memerlukan ketersediaan ruang terbuka yang luas untuk anggota masyarakat dapat melaksanakan permainan ini. Di Kota Padang banyak penekun kedua permainan ini dan mereka melakukan kegiatannya di Kota Padang sendiri. Karena tidak tersedia ruang terbuka yang memadai banyak pencinta permainan layang-layang bermain layang-layang di jalan raya dan di gang-gang areal pemukiman.

Ketiga, ruang sebagai habitat melaksanakan keyakinan. Anggota setiap masyarakat di Indonesia memiliki keyakinan. Para antropolog mengklasifikasinya sebagai agama dan religi. Setiap keyakinan agama dan religi mengandung unsur ritual, upacara-upacara yang esensinya penyembahan atau ibadah. Ritual agama dan religi memerlukan ruang untuk melaksanakannya. Kadang kala, di masyarakat tertentu ritual agama dan religi dilakukan bukan di areal pemukiman, melainkan di tempat-tempat khusus yang dianggap keramat. Undang-undang lingkungan memperlakukan hal ini sebagai area konservasi dan dimasukkan sebagai *High Conservation Value 5* (HCV5).

Hak Ulayat Sebagai Habitat Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat mendefinisikan tanah dalam wilayah yang mereka sadari dan ketahui batas-batasnya dan yang merupakan habitatnya sebagai hak milik kolektif mereka. Tanah tersebut mereka warisi dari generasi ke generasi. Definisi ini menjadi pengetahuan umum anggota masyarakat hukum adat. Sebutannya berbeda-beda, tetapi yang populer dalam wacana hukum agraria adalah sebutan hak ulayat atau tanah ulayat.

Dalam pandangan anggota masyarakat hukum adat, tanah ulayat tersebut tidak merupakan suatu kategori tunggal melainkan terdiri dari sub-sub kategori. Beberapa contoh sebagai berikut.

1. Bagi Masyarakat Minangkabau tanah ulayat terdiri dari beberapa kategori yang menjelaskan perbedaan otoritas dan akses. Pertama adalah tanah ulayat nagari atau disebut juga tanah adat atau tanah *rajo*. Kedua adalah tanah ulayat suku atau *bosa* (di Pasaman Barat). Ketiga adalah tanah ulayat kaum atau ulayat *niniak mamak*.
2. Di Kabupaten Palalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tanah ulayat dibagi dua yaitu: tanah *perbatinan* (semacam suku) dan tanah *ketiapan* (sub-suku).

3. Di Citedug, Jawa Barat, tanah ulayat dibagi:
 1. *Leuweung kolot*: kawasan lindung
 2. *Leuweung titipan*: kawasan lindung yang ada batas.
 3. *Leuweung cadangan*: kawasan cadangan untuk perluasan.
 4. *Reuma*: lahan garapan

Masyarakat hukum adat tersebut memiliki aturan-aturan sendiri tentang pengelolaan tanah. Aturan-aturan tersebut sering dinamakan hukum adat. Ada aturan-aturan alokasi tanah atau pemberian hak atas tanah, dan ada pula aturan pencabutan hak atas tanah. Dengan demikian, tanah ulayat tidaklah termasuk *the common* yang dikenal dalam kepustakaan pengelolaan sumberdaya alam.

Problema Keadilan Ekologis Bagi Masyarakat Hukum Adat

Negara Republik Indonesia mengakui³ hak ulayat masyarakat hukum adat. Ini adalah pengakuan ruang sebagai habitat masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut dapat dilihat dalam UUPA No 5/1960. Undang-undang ini mengakui hak ulayat Masyarakat Adat atas tanah. Dinyatakan bahwa tanah ulayat adalah tanah milik masyarakat hukum adat. Ada pula pemerintah daerah yang secara formal mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Umpamanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengakui hak ulayat masyarakat nagari. Pengakuan tersebut paling kurang tertuang dalam dua Perda. Pertama, menurut Perda No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, masyarakat nagari memiliki ulayat nagari yang disebut harta kekayaan nagari. Dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa yang termasuk ke dalam hak ulayat nagari itu adalah hutan dan sungai, disamping yang lain seperti pasar dan masjid. Pemerintah kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat juga mengakui hak

ulayat. Ini tertuang dalam Perda pemerintahan nagari yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah kabupaten. Kedua, Perda No 16/2008 tentang Pemanfaatan Tanah ulayat menegaskan lagi pengakuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas hak ulayat masyarakat nagari tersebut. Tanah ulayat dinyatakan sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun dan dinyatakan sebagai hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Pemerintah Kalimantan Tengah juga secara resmi mengakui hak-hak ulayat masyarakat hukum adat di provinsi tersebut. Dalam pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dinyatakan bahwa Masyarakat Dayak memiliki hak adat atas tanah. Hak adat dinyatakan sebagai hak berdasarkan hukum adat.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah masyarakat hukum adat fenomena masa silam ataukah termasuk fenomena masyarakat Indonesia modern? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu membahas indikator masyarakat hukum adat yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur: 1). Adanya masyarakat yang memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*); 2) Adanya pranata pemerintahan adat; 3) Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; 4) Adanya perangkat norma hukum adat. Dengan indikator-indikator tersebut masyarakat hukum adat adalah fenomena Negara Indonesia Modern karena masyarakat dengan kriteria di atas dapat ditemukan di berbagai provinsi di Indonesia. Mereka berada hampir di semua pulau-pulau besar republik ini.

Walaupun hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat diakui, terjadi

³ Undang-undang sektoral tidak mengakui hak ulayat secara eksplisit adalah persoalan yang lain.

ketidakadilan ekologis terhadap masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah. Dalam kenyataannya, hak ulayat atau hak adat atas tanah tersebut diabaikan oleh pemerintah dan pengusaha. Hasil penelitian yang saya lakukan di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa baik pemerintah kabupaten maupun pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit mengakui bahwa tanah yang akan dialihfungsikan dari kawasan hutan⁴ menjadi lahan perkebunan kelapa sawit adalah hak ulayat komunitas nagari dan kelompok kekerabatan tertentu (*kaum*)⁵. Buktinya adalah disamping tertulis kata tanah ulayat dalam surat penyerahan tanah, baik pemerintah kabupaten maupun pihak perusahaan telah melakukan kegiatan mendapatkan izin dari pimpinan adat sebagai pemegang otoritas atas tanah ulayat untuk menguasai lahan. Akan tetapi, terjadi ketidakwajaran dan ketidakjujuran dalam penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan sawit, sehingga mengakibatkan perlawanan dan protes dari pemilik hak ulayat, perasaan tidak menyerahkan tanah ulayat, serta multi tafsir atas isi perjanjian penyerahan tanah ulayat. Ketidakwajaran dan ketidakjujuran tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penyerahan tanah ulayat dilakukan oleh pimpinan adat kepada pemerintah kabupaten dan pada kasus-kasus tertentu langsung kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi pembuatan keputusan penyerahan tanah ulayat oleh pimpinan adat tidak dilakukan sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Pertama, pembuatan keputusan tidak melibatkan multipihak dalam komunitas nagari atau kelompok kekerabatan. Hal yang terjadi adalah keputusan penyerahan tanah ulayat dibuat hanya

antara pimpinan adat dan sering juga antara pimpinan adat tertentu dengan tidak melibatkan pimpinan adat yang lain. Elemen komunitas nagari yang lain seperti perempuan dan pemuda dan anggota kelompok kekerabatan tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Akibatnya, seperti yang ditunjukkan oleh hasil-hasil penelitian, anggota komunitas nagari dan kelompok kekerabatan yang merasa berhak untuk dilibatkan dalam pembuatan keputusan merasa tidak menyerahkan lahan dan menuduh pimpinan adat bertindak bukan sebagai pemimpin komunitas nagari dan kekerabatan melainkan sebagai diri sendiri. Dengan demikian, proses pengambilalihan tanah ulayat yang telah dipraktekkan telah menimbulkan perpecahan antara pimpinan adat, antara pimpinan adat dan anggota komunitas nagari, dan antara pimpinan adat dengan anggota kelompok kekerabatan. Anggota komunitas nagari dan kelompok kekerabatan yang tidak puas dengan proses penyerahan tanah ulayat tersebutlah yang mengorganisasi perlawanan dan protes terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kedua, pembayaran yang diterima oleh pemimpin adat sebagai pemegang otoritas atas hak ulayat atas diserahkannya lahan bagi investor perkebunan kelapa sawit tidak transparan karena tidak diketahui oleh anggota komunitas nagari dan kekerabatan. Disamping itu, pembayaran yang diberikan oleh pihak perusahaan atas diserahkannya tanah ulayat dibagi-bagi di antara pimpinan adat dan keluarga dekat mereka. Hal ini membuat anggota komunitas nagari dan kekerabatan yang tidak menerima uang pembayaran merasa tidak menyerahkan tanah ulayat kepada pemerintah dan perusahaan. Mereka malah merasa dicurangi oleh pimpinan adat. Hal ini sesungguhnya akibat dari proses pengambilan keputusan penyerahan tanah ulayat didominasi oleh pimpinan adat atau oleh pimpinan adat tertentu.

Ketiga, dari sudut pandang komunitas nagari dan anggota kelompok kekerabatan

⁴ Dalam berbagai dokumen izin pengolahan lahan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dinyatakan bahwa lahan yang akan diserahkan adalah kawasan hutan.

⁵ Temuan ini menunjukan bahwa walaupun ada masalah pengakuan pemerintah terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam berbagai undang-undang, *de facto* di Sumatera Barat hak ulayat dan tanah ulayat diakui keberadaannya oleh pejabat pemerintah.

perusahaan ada kejadian perkebunan kelapa sawit merampas tanah ulayat mereka. Pertama, ada perusahaan perkebunan yang menggarap lahan untuk kebun inti di luar dari areal yang diserahkan oleh pimpinan adat tanpa persetujuan dari pimpinan adat yang menyerahkan. Adapula perusahaan-perusahaan yang menggarap lahan yang disediakan bagi lokasi kebun plasma menjadi kebun inti perusahaan tanpa persetujuan pemilik hak ulayat atau persetujuan calon peserta plasma.

Di Provinsi Riau ditemukan pula ketidakwajaran dan ketidakjujuran dalam proses pengambilalihan tanah hak ulayat. Pertama, baik pemerintah maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak mengakui bahwa tanah yang akan dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit adalah hak ulayat komunitas adat, padahal di wilayah tersebut hidup masyarakat hukum adat. Proses pengambilalihan lahan tanpa persetujuan komunitas adat. Berbeda dengan kejadian di Provinsi Sumatera Barat, di Provinsi Riau, pemerintah dan perusahaan tidak melakukan kegiatan mendapatkan izin dari pemilik tanah ulayat untuk menggarap lahan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pengakuan terhadap hak ulayat.

Pada umumnya lahan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan adalah bekas Hak Penguasaan Hutan (HPH) berbagai perusahaan. Pemerintah Provinsi Riau kemudian mengalihkan HPH tersebut menjadi hak pakai perusahaan perkebunan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit tanpa izin atau dari masyarakat hukum adat. Berbeda dari pemerintah, komunitas adat di Provinsi Riau berpandangan bahwa lahan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah tanah ulayat mereka.

Pada tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat. Dengan Perda tersebut pemerintah Kabupaten Kampar mengakui keberadaan hak ulayat komunitas adat atas sumber daya alam di

Kabupaten Kampar. Akan tetapi, ditemukan ada sebagian lahan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit diakui oleh perusahaan sebagai tanah hak ulayat komunitas lokal⁶, tetapi negosiasi pelepasannya tidak dilakukan dengan pimpinan adat, melainkan dengan kepala desa, sehingga menimbulkan protes dari pimpinan adat. Hal ini berarti, walaupun tanah diakui sebagai hak ulayat komunitas adat, pembuatan keputusan penyerahan tanah ulayat tidak melibatkan multipihak dalam komunitas lokal dan kekerabatan. Disamping itu, pembayaran yang diterima oleh pemilik hak ulayat atas diserahkannya lahan bagi investor perkebunan kelapa sawit tidak transparan, sehingga tidak diketahui oleh multipihak dalam komunitas nagari dan kekerabatan. Juga ditemukan bahwa dari pandangan pemilik hak ulayat, ada perusahaan perkebunan yang menggarap lahan di luar dari areal yang diserahkan tanpa persetujuan dan ada pula perusahaan yang menggarap lahan yang disediakan bagi lokasi kebun plasma menjadi kebun inti perusahaan tanpa persetujuan pemilik tanah ulayat.

Praktek-praktek sosial dalam proses pengambilalihan tanah ulayat yang telah disajikan di atas melanggar kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku di nagari-nagari, contohnya di Kabupaten Pasaman Barat. Menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Pasaman Barat, seluruh pimpinan adat (*ninik mamak*) adalah pemegang otoritas atas tanah ulayat nagari. Terdapat variasi mengenai otoritas pucuk adat (pimpinan *ninik mamak*). Di beberapa nagari, pucuk adat termasuk pemegang otoritas atas tanah ulayat, sedangkan di nagari yang lain pucuk adat bukan pemegang otoritas atas tanah hak ulayat nagari. Walaupun otoritas penyerahan tanah ulayat di tangan pimpinan adat, keputusan atas tanah ulayat harus dibuat dalam rapat, bukan oleh individual pimpinan adat atau bukan oleh sesama

⁶ Hal ini terjadi setelah pimpinan adat memprotes perusahaan dan meyakinkan perusahaan bahwa tanah yang akan mereka jadikan perkebunan kelapa sawit adalah hak ulayat mereka.

pimpinan adat. Keputusan atas tanah ulayat nagari dibuat dalam rapat nagari yang dihadiri oleh berbagai pihak, sedangkan keputusan atas tanah ulayat kaum di buat dalam rapat kaum. Rapat nagari harus dihadiri oleh berbagai elemen dalam nagari, seperti *ninik mamak*, *pucuak* adat, pimpinan informal selain dari *ninik mamak* dan anggota kekerabatan yang perempuan. Rapat kaum harus dihadiri oleh berbagai elemen dalam kaum seperti *ninik mamak* sebagai pimpinan kaum, anggota kaum yang dewasa termasuk anggota kaum perempuan dewasa. Artinya, ada representasi berbagai elemen yang harus hadir baik dalam rapat nagari maupun rapat kaum untuk membuat keputusan. Prinsip tersebut sesuai dengan azas keseimbangan kekuasaan dalam pembuatan keputusan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda Tanah Ulayat pada tahun 2008 yang mengakui keberadaan tanah ulayat. Perda tersebut mengakui bahwa *ninik mamak* pemegang otoritas atas tanah ulayat, tetapi keputusan atas tanah ulayat dibuat dalam rapat nagari atau kaum. Perda ini sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kabupaten, seperti kasus Pasaman Barat.

Di Provinsi Riau juga ditemukan bahwa pengambilalihan tanah yang diakui sebagai hak ulayat komunitas adat tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku, umpunya yang terjadi di Kabupaten Kampar. Menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kampar, seluruh pimpinan adat (*ninik mamak*) adalah pemegang otoritas atas tanah ulayat nagari. Akan tetapi, keputusan atas tanah ulayat di buat dalam rapat adat, bukan oleh atau antara individu pimpinan adat. Keputusan atas tanah ulayat nagari dibuat dalam rapat nagari, sedangkan keputusan atas tanah ulayat kaum di buat dalam rapat kaum. Rapat nagari harus dihadiri oleh berbagai elemen dalam nagari, seperti *ninik mamak*, pimpinan informal selain *ninik mamak* dan perempuan. Rapat kaum harus dihadiri oleh berbagai elemen dalam kaum. Artinya, ada representasi berbagai elemen yang harus hadir baik dalam rapat nagari maupun rapat kaum.

Pada hal, pernyataan bahwa keputusan atas tanah ulayat dibuat dalam rapat nagari juga disebutkan dalam Perda Tanah Ulayat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 1999 yang mengakui keberadaan tanah ulayat. Perda tersebut mengakui bahwa *ninik mamak* pemegang otoritas atas tanah ulayat tetapi keputusan atas tanah ulayat dibuat dalam rapat nagari. Perda tersebut sesuai dengan apa yang dipahami oleh komunitas adat, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, penulis menyampaikan bahwa telah terjadi ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah dalam wilayah kehidupan mereka. Bagi masyarakat hukum adat, ruang penting bagi mereka. Ruang adalah habitat mereka, tempat mereka melakukan berbagai keperluan dan penanda diri. Studi kasus di Provinsi Sumatera Barat dan Riau menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang dalam habitat mereka untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak mengindahkan keberadaan dan kepentingan mereka. Dari sudut keadilan ekologis, hal tersebut adalah ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat. Akibatnya, mereka menentang dan melawan pihak-pihak yang mengambilalih lahan tanpa memperdulikan keberadaannya dan mengindahkan kepentingannya. Ini adalah dasar motivasi resistensi dan perlawanan warga masyarakat hukum adat dalam mempertahankan atau merebut tanah.

Kepustakaan

- Afrizal, 2011. *Politics, Society and Nature: Deforestation of Tessonilo Landscape*. Makalah untuk seminar internasional, Universiti Malaya, 12-14 Juli 2011, Kuala Lumpur.
- _____, 2010. *Large-Scale Palm Oil Plantation Development, Recognition of Local People's*

- Customary Rights and Agrarian Conflicts in Indonesia After the Fall of President Soeharto: A Lesson Learned from Provinces of West Sumatra and Riau*. CIAS Discussion Paper, No. 15, hal. 97-126.
- _____, 2007a. *The Nagari Community, Business and the State: The Origin and the Process of Contemporary Agrarian Protests In West Sumatera*. Forest People Programmed dan Sawit Watch, Bogor.
- _____, 2007b. *Negara dan Konflik Agraria: Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, No. 3, tahun XX, hal. 89-107.
- _____, 2007c. *Large-scale Palm Oil Plantation and Its Implication to Local Communities: An Experience of West Sumatera*. Makalah untuk Seminar Internasional. Universiti Kebangsaan Malaysia, November 2007, Kuala Lumpur.
- _____, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Universitas Andalas Press, Padang.
- _____, 2005a. *Resolusi Konflik Tanah Ulayat*. Sigai, Jurnal Sosiologi, Vol. VI. No. 9.
- _____, 2005b. *Anggota Kaum Caniago Melawan BPN*. Sigai, Jurnal Sosiologi, Vol. VI. No. 10.
- _____, 2002. *Hukum Agraria, Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Indonesia: Acuan Khusus terhadap Sumatera Barat*. Working paper Sosiologi Andalas, Vol. VI, No. 6
- Bachriadi, D., 2001. *Situasi Perkebunan di Indonesia Kontemporer dalam Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, eds. Yogyakarta; Tim Lapera, Lepera Pustaka Utama.
- Colchester, Marcus, 2009. *Menyelamatkan Alam, Penduduk Asli, Kawasan Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Denpasar; WGCop.
- Colchester, M., dkk., 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia-Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Forest People Programme. Bogor; Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre.
- Colchester, M., dan Jiwan, N., 2006. *Ghosts On Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and the Rountbale on Sustainable Palm Oil*. Bogor; Forest People Programme & Sawit Watch,.
- DFID, 2000. *Realising Human Rights for Poor People: Strategies for Achieving the International Development Targets*, Artikel untuk DFID.
- Lauer, H., Robert, 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta; Bina Aksara.
- Lury, Celia, 1998. *Budaya Konsumen*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Nuh, J., M. and Collins, E., 2001, *Land Conflict and Grassroots Democracy in South Sumatera: The Dynamics of Violence in South Sumatra*. Antropologi Indonesia, Tahun XXXV, no. 64, pp. 41-55.
- Williams, Jerry, 2007. *Thinking as Natural: Another Look at Human Exemptionalism*. Human Ecology Review, vol. 14 No, 2, hal. 130-139.